

# TINJAUAN YURIDIS NORMATIF KONSEP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN ADANYA OTONOMI KHUSUS PEMERINTAHAN ACEH (Tinjauan Terhadap Hak Pemberlakuan Syariat Islam)



Oleh: JOHAR KISWATI ( 03400105 )

Law

Dibuat: 2008-04-01 , dengan 2 file(s).

**Keywords:** Otonomi khusus, Syariat islam, Negara kesatuan.

Otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia merupakan tindakan yang diambil untuk menindak lanjuti dari Nota Kesepahaman Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Dalam pengaturan otonomi khusus tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pengaturan otonomi khusus Aceh tersebut memberikan hak-hak khusus kepada pemerintah Aceh salah satunya hak pemberlakuan syariat Islam yang tidak diberlakukan di daerah lain. Dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh tidak lagi menggunakan hukum nasional yaitu tidak lagi menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai hukum materiil, sedang untuk hukum formil tidak lagi menggunakan Kitab Hukum Acara Pidana maupun Kitab Hukum Acara Perdata. Hal ini yang menjadi objek sekaligus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis konsep negara kesatuan Republik Indonesia dengan adanya otonomi khusus ditinjau dari hak pemberlakuan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi masyarakat Aceh.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan memanfaatkan teknik analisa data deskriptif kualitatif yaitu dengan mengadakan penelusuran atau kajian Undang-Undang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lain dengan tujuan menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

Berdasarkan hasil penelitian, Sebelum amandemen UUD 1945 Indonesia sebagai negara kesatuan yang kaku, dimana semua daerah diatur secara serentak dan seragam tidak ada perbedaan antara daerah istimewa maupun daerah lain. Setelah amandemen UUD 1945 dan adanya Nota Kesepakatan Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka untuk tetap mempertahankan Aceh agar tetap dalam naungan NKRI diberikan pengaturan otonomi khusus untuk Pemerintahan Aceh. Dimana otonomi khusus untuk Aceh tersebut memberikan pengaturan yang berbeda dari daerah lain di Indonesia terlebih hak pemberlakuan syariat Islam bagi rakyat Aceh. Dengan adanya hak pemberlakuan syariat Islam di NAD tidak lagi di gunakan hukum nasional seperti di daerah lain KUHP maupun KUHPPerdata dan KUHPA maupun KUHPAPerdata, di NAD diberi hak menggunakan hukum yang didasarkan syariat Islam baik pengaturan maupun sanksinya dan juga untuk hukum formil maupun hukum materiilnya . Sedang sebagai negara kesatuan dalam praktek selama ini semua daerah adalah digunakan hukum nasional semua sama antar daerah. Dalam praktek kenegaraan satu daerah tidak lagi menggunakan hukum nasional dan memiliki hukum tersendiri adalah dalam praktek negara federasi. Sedang Indonesia merupakan negara kesatuan seperti tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dan bentuk tersebut tidak dapat dirubah tercantum dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 maka pemberlakuan syariat Islam merupakan penyimpangan bentuk kesatuan dan dengan adanya otonomi khusus untuk pemerintah Aceh, Indonesia tidak lagi

sebagai negara kesatuan yang kaku seperti sebelum amandemen tetapi seiring dari tuntutan daerah khususnya Aceh yang ingin melepaskan diri, maka pemerintah memberikan pengaturan yang berbeda sesuai keinginan rakyat aceh agar Aceh tetap dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang dinamis atau merupakan negara kesatuan yang menjalankan sistem one state multy system.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Indonesia dalam menjalankan negara sebagai negara kesatuan tidak lagi sebagai negara kesatuan yang kaku seperti sebelum amandemen UUD 1945, namun dengan seiring adanya tuntutan daerah negara kesatuan menyesuaikan diri dengan bersifat dinamis dalam pengaturan untuk daerah istimewa khususnya Aceh agar tetap dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pemberian otonomi khusus Aceh memiliki hak-hak khusus yaitu hak memberlakukan asas keislaman, hak untuk membentuk partai politik lokal, hak untuk membentuk lembaga adat, hak pemberlakuan syariat Islam, hak untuk membentuk Mahkamah syar'iyah, hak untuk membentuk MPU, hak perimbangan keuangan untuk NAD, hak untuk menggunakan bendera, lambang dan himne, hak pengujian qonun yang berbeda dengan daerah lain. Hak pemberlakuan syariat Islam memberikan ciri yang sangat khusus bagi Aceh dan pemberlakuan syariat Islam di NAD, bagi umat Islam di Aceh tidak lagi berlaku hukum nasional seperti daerah lain yaitu KUHP maupun KUHPERDATA, KUHAP maupun KUHAPERDATA. Hal ini diambil untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan bagi Indonesia dan Aceh tetap dalam naungan negara kesatuan Indonesia. Maka dengan pemberlakuan hukum syariat Islam di NAD ini Indonesia sebagai negara kesatuan yang menjalankan sistem one state multy system.

Special autonomy which given by republic government of Indonesia is pisaller to act of Note of Understanding Helsinki between Republic Government Of Indonesia with Movement Aceh Independence. In arrangement of the special autonomy poured in Law Number 11 Year 2006 concerning Governance of Aceh, arrangement of special autonomy of Aceh give special rights to government of Aceh one of them rights application of un-gone into effect by Islam syariat in other area. With application of Islam syariat in Aceh shall no longger use national law that is shall no longger use Book Criminal law and Civil Code as material law, is for the law of formal shall no longger use Book Procedure of criminal and Book Procedure of civil law. This Matter which become object at the same time the problem of this research is how evaluation of yuridis conception Republic Of Indonesia unity state with existence of special autonomy evaluated from rights applying of Islam syariat in societal life and have state to for Aceh society.

Research method which used in this research is normatif yuridis exploited technique analyse descriptive data qualitative that is performed a Law study or seeking Governance of Aceh to Constitution 1945 and other legislation order with a purpose to answer problems which have been told.

Pursuant to research result, Before UUD amandemen 1945 Indonesia as stiff unity state, where all areas arranged at a time and uniform there no differentiation between special region and other area. After UUD amandemen 1945 and existence of Note Agreement of Helsinki between Republic Government Of Indonesia with Movement Aceh Independence to keep maintaining Aceh so that remain to in wings of NKRI given by arrangement of special autonomy for the Governance of Aceh. Where special autonomy for the Aceh give different arrangement of other area in Indonesia particularly rights applying of Islam syariat for Aceh people. With existence of rights application of Islam syariat in NAD shall no longger in using national law as in other area of KUHP and KUHPERDATA and of KUHAP and of KUH Perdata, in NAD entitled to use

based by law is good Islam syariat of arrangement and dubious of him as well as for the law of formal or material law of him . Is as unity state in practice during all these of areas is used by national law all is same between areas. In the practice of politicals one area shall no longer use national law and have separate law is in practice federation state. Indonesia Are is unity state like written in Section 1 sentence (1) UUD 1945 and the form do not earn to be altered written in Section 37 sentence (5) UUD 1945 hence application of Islam syariat is deviation of unity form and with existence of special autonomy for the government of Aceh, Indonesia shall no longer as stiff unity state like before amandemen but along from the special district demand of Aceh which wish seceded, hence government give different arrangement according to desire of people of Aceh so that Aceh remain to in wings of Unity State Republic Of Indonesia so that this matter make Indonesia as dynamic unity state or is unity state running system of one system multy state. Conclusion of this research is Indonesia in running state as unity state shall no longer as stiff unity state like before UUD amandemen 1945, but along the existence of unity state area demand adapt to to have the character of dynamic in arrangement for special region specially Aceh so that remain to in wings of Unity State Republic Of Indonesia. With [gift/ giving] of special autonomy of Aceh have special rights that is rights go into effect ground of Islam, the right to form local political party, the right to form custom institute, rights application of Islam syariat, the right to form Lawcourt of syar'iyah, the right to form MPU, counter balance rights finance for NAD, the right to use flag, and device of himne, rights examination of qonun differing from other area. Rights application of Islam syariat give characteristic very khusus for Aceh and application of Islam syariat [in] NAD, for Islam people in Aceh shall no longer apply national law like other area that is KUHP and of KUH Perdata, KUHAP and of KUHA Perdata. This Matter is taken to keep maintaining unity state form for Indonesia and Aceh remain to in wings of Indonesia unity state. Hence with law enforcement of Islam syariat in this NAD of Indonesia as unity state running system of one system multy state.